

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pemerintah daerah bahkan nasional selalu berupaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Menurut Frisdiantara dan Mukhlis (2018), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, baik yang tinggal di lingkungan pendek maupun panjang. Salah satu hal yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah keberhasilan pembangunan ekonominya.

Menurut Profesor Simon Kuznet, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai barang dan jasa bagi warga negaranya dalam jangka waktu yang wajar. Kemampuan tersebut didasarkan pada kemajuan teknologi, kepatuhan bisnis, dan ideologi yang diperlukan (Jhingan, 2018). Menurut penelitian ekonomi lainnya, pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan kondisi ekonomi suatu daerah secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa keadaan ekonomi membaik dan tingkat kesejahteraan masyarakat umum akan meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah melambat, keadaan ekonominya menurun dan tingkat kesejahteraannya juga menurun. Oleh karena itu, laju pertumbuhan

ekonomi sangat penting bagi analisis ekonomi karena berfungsi sebagai indikator yang akan menunjukkan arah tindakan di masa mendatang.

Pada periode 2018-2019, ekonomi Sumut menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, didorong oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta sektor pariwisata. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini berkisar antara 5-6 persen per tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sektor pertanian, terutama kelapa sawit, karet, dan produk hortikultura, menjadi pilar utama ekonomi Sumut, sementara sektor industri pengolahan, termasuk industri makanan dan minuman, juga menyumbang signifikan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sumut.

Selain itu, sektor perdagangan yang didorong oleh pelabuhan-pelabuhan besar seperti Belawan, yang merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia, berperan penting dalam mendorong ekspor komoditas utama Sumut. Sumut juga mengalami perkembangan sektor pariwisata, meskipun potensi wisata alam dan budaya belum sepenuhnya dimaksimalkan.

Pada tahun 2020, seperti banyak wilayah lainnya, Sumut terpapar dampak besar dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Berdasarkan data BPS, ekonomi Sumut mengalami penurunan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi yang turun tajam hingga -2,56% pada kuartal II 2020. Hal ini disebabkan oleh pembatasan sosial yang mengganggu aktivitas ekonomi, penurunan permintaan komoditas, dan terbatasnya mobilitas orang yang menghambat sektor perdagangan dan pariwisata.

Sektor-sektor seperti transportasi, pariwisata, dan perdagangan non-pangan menjadi yang paling terdampak. Di sisi lain, sektor pertanian relatif bertahan meskipun ada beberapa kendala dalam distribusi barang dan pasokan tenaga kerja.

Selama periode 2018-2023, Sumut menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya. Di antara tantangan utama adalah ketergantungan terhadap komoditas ekspor, ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat distribusi barang dan jasa.

Namun, di sisi lain, Sumut juga memiliki potensi besar, seperti pengembangan sektor pariwisata yang dapat lebih dimaksimalkan, peningkatan nilai tambah pada produk pertanian melalui industri pengolahan, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan:



Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara 2018-2023



Sumber Badan Pusat Statistika Sumut

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat saling berkaitan erat. Berdasarkan data BPS Sumatera Utara (2023), salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikatornya. PDRB sendiri merupakan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan kepemilikan faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung berdasarkan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencerminkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Nilai PDRB memberikan gambaran umum

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari sejauh mana kemajuan ekonominya telah tercapai atau belum. Oleh karena itu, tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator utama bagi suatu daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian Warsilan dan Noor (2015) yang berjudul "Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda" menunjukkan bahwa infrastruktur jalan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Samarinda. Peranan infrastruktur jalan dalam perekonomian yaitu mempermudah distribusi faktor produksi barang dan jasa.

Dalam Teori Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Teori ini berpendapat bahwa infrastruktur, termasuk jalan dan sistem transportasi, memiliki dampak langsung terhadap produktivitas dan efisiensi perekonomian. Jalan yang baik memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat pergerakan barang antar daerah. Hal ini mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, mempercepat proses distribusi, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas, yang berujung pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Infrastruktur jalan juga berperan dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, yang penting untuk mendorong perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Dengan akses yang lebih baik ke pasar dan sumber daya,

perekonomian menjadi lebih terintegrasi dan dinamis, meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional.

Teori Investasi dan Pembangunan Ekonomi dalam hal ini infrastruktur dianggap sebagai investasi jangka panjang yang penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan merupakan salah satu bentuk investasi publik yang dapat mendorong produktivitas di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Pembangunan jalan meningkatkan akses ke fasilitas produksi, memperpendek waktu distribusi barang, dan mengurangi biaya operasional, yang pada akhirnya mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Pada periode 2018-2019, kondisi infrastruktur jalan di Sumut cukup bervariasi, dengan sebagian besar jaringan jalan sudah memadai di daerah perkotaan, terutama di Kota Medan dan kota-kota besar lainnya. Namun, beberapa wilayah pedesaan dan daerah terpencil masih menghadapi tantangan besar, seperti jalan yang rusak, berlubang, atau bahkan belum teraspal. Kondisi ini menghambat mobilitas barang dan orang, serta mengurangi potensi pengembangan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, baik yang bersifat lokal maupun jalan nasional yang menghubungkan antarprovinsi. Beberapa proyek peningkatan jalan seperti pembangunan jalan tol, jalan raya, dan jembatan mulai digencarkan pada periode ini untuk memperlancar arus distribusi barang dan memperpendek waktu tempuh antarwilayah.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan, tetapi proyek infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi. Meskipun ada pembatasan sosial, pemerintah tetap melanjutkan sejumlah proyek strategis yang bertujuan memperbaiki dan memperluas jaringan jalan di Sumut, terutama jalan yang menghubungkan daerah terpencil dengan kota-kota besar.

Pada periode 2021-2023, pemerintah Sumut, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, semakin fokus pada pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan mendukung sektor-sektor strategis. Pemerintah juga mulai menggulirkan inisiatif berbasis teknologi, seperti sistem pemantauan kondisi jalan secara digital dan pemeliharaan berbasis data untuk memastikan keberlanjutan kualitas jalan. Adapun perkembangan panjang jalan pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

THE
Character Building
UNIVERSITY

Gambar 1.2

Grafik Total Panjang Jalan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023



Sumber Badan Pusat Statistika Sumut

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa panjang jalan yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020-2021 panjang jalan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan akibat kerusakan. Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan akibat perbaikan untuk kemajuan ekonomi di Sumatera Utara.

Apabila dilihat dari grafik panjang jalan yang terdapat pada Kabupaten dan Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 maka diketahui bahwa infrastruktur jalan Berdasarkan data panjang jalan Kabupaten/Kota tahun 2018-2023 tersebut dapat diketahui bahwa infrastruktur jalan masih berpusat pada Kota-Kota besar. Adanya ketimpangan pembangunan jalan ini dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian di beberapa daerah menjadi kurang optimal.

Sehingga membuat jumlah PDRB pada kabupaten/Kota mengalami ketimpangan yang tentunya berdampak pada jumlah PDRB Sumatera Utara.

Selain infrastruktur faktor lain yang mempengaruhi peningkatan PDRB adalah kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang masuk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh masyarakat dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang maupun jasa jika terdapat permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2017).

Menurut Todaro (1995) pertumbuhan penduduk yang juga akan mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebutkan apabila angkatan kerja semakin banyak maka tenaga kerja produktif akan semakin banyak pula, peningkatan penduduk yang semakin besar dapat memperluas pasar dalam negeri. Adapun perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

THE
Character Building
UNIVERSITY

Gambar 1.3
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018-2023



Sumber BPS Sumatera Utara (data diolah)

Berdasarkan grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terlihat adanya fluktuasi. TPAK tertinggi tercatat pada tahun 2018, yaitu sebesar 71,82 persen, sedangkan TPAK terendah terjadi pada tahun 2020 dengan angka sebesar 68,67 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian Sumatera Utara, saat TPAK mengalami penurunan pada tahun 2019, perekonomian justru menunjukkan adanya peningkatan. Sebaliknya, meskipun TPAK mengalami peningkatan pada tahun 2020, PDRB Sumatera Utara mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya permintaan tenaga kerja, yang berujung pada tingginya angka pengangguran. pengangguran sehingga membuat tingkat Pertumbuhan ekonomi tidak bertumbuh dengan baik (BPS Sumatera Utara 2023).

Dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam perekonomian, termasuk jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Tingkat partisipasi angkatan kerja (seperti jumlah orang yang bekerja dalam ekonomi) menjadi faktor penting dalam menentukan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan Ekonomi.

Dalam periode 2018-2023, Sumut mengalami fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun sektor pertanian, perkebunan, dan industri masih mendominasi ekonomi daerah ini, ada juga penurunan yang signifikan akibat pandemi COVID-19 pada 2020 yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk ketenagakerjaan. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi berkontribusi pada peningkatan partisipasi angkatan kerja setelah 2021.

Sebagian besar angkatan kerja di Sumut bekerja di sektor informal, terutama di pertanian dan perdagangan. Hal ini berdampak pada tingkat pendapatan dan kestabilan pekerjaan bagi sebagian besar pekerja, serta menurunkan kontribusi sektor formal terhadap total lapangan kerja.

Populasi Sumut yang terus berkembang juga memengaruhi jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk usia kerja di Sumut terus meningkat, yang berpotensi meningkatkan partisipasi angkatan kerja, baik dari segi pendaftar baru maupun yang telah bekerja.

Meskipun ada peningkatan dalam tingkat pendidikan di Sumut, masih ada kesenjangan antara jumlah angkatan kerja terdidik dan yang tidak terdidik. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi cenderung masih terbatas di sektor-sektor tertentu, sementara banyak angkatan kerja yang mengisi posisi dengan keterampilan rendah atau tidak terlatih.

Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang lebih produktif, pemerintah daerah dan berbagai lembaga pendidikan telah mengupayakan pelatihan keterampilan, namun masih ada tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja adalah ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat penciptaan lapangan kerja, sementara di daerah pedesaan, terutama yang bergantung pada sektor pertanian, masih mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka di Sumut cenderung mengalami penurunan seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelatihan keterampilan. Namun, pengangguran masih menjadi isu utama, terutama di kalangan lulusan pendidikan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Secara keseluruhan, partisipasi angkatan kerja di Sumut pada periode 2018-2023 dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan yang berubah-ubah, dengan tantangan besar pada ketidakmerataan lapangan pekerjaan dan

peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan investasi dalam sektor baru diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dan jumlah lapangan pekerjaan di masa depan.

Dalam upaya peningkatan perekonomian, selain jumlah tenaga kerja, kualitas tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi juga memegang peranan penting. Menurut Sukirno (2016), ketersediaan modal saja tidak cukup untuk memodernisasi suatu perekonomian. Misalnya, dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan, dibutuhkan tenaga kerja yang terdidik, seperti tenaga ahli di berbagai bidang teknik, akuntansi, dan manajemen. Oleh karena itu, tenaga kerja tersebut memerlukan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, untuk mendukung pembangunan ekonomi, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Berdasarkan data BPS Sumatera Utara, tingkat pendidikan suatu daerah dapat diukur dari rata-rata lama sekolah.

Pada periode 2018-2023, Sumut mengalami peningkatan dalam hal akses pendidikan, meskipun masih terdapat disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan dan renovasi sekolah, terutama di wilayah terpencil. Program seperti "Program Indonesia Pintar" juga memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, yang membantu mengurangi angka putus sekolah.

Walaupun akses pendidikan terus meningkat, kualitas pendidikan di Sumut tetap menjadi pekerjaan rumah. Terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil,

banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkompoten. Sebagai upaya meningkatkan kualitas, beberapa program pelatihan dan sertifikasi bagi guru diadakan, namun tantangan besar masih ada terkait pemerataan kualitas pengajaran.

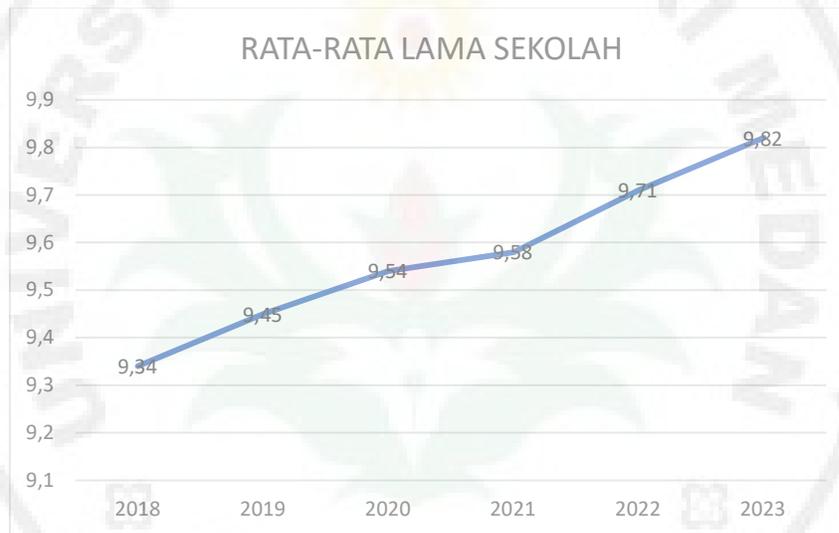
Dalam hal pendidikan tinggi, Sumut memiliki beberapa universitas terkemuka, seperti Universitas Sumatera Utara (USU). Namun, terdapat ketimpangan antara jumlah lulusan pendidikan tinggi dengan kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, di masa 2018-2023, berbagai program pelatihan keterampilan dan penguatan vokasi turut digalakkan untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten di sektor industri.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap sistem pendidikan di Sumut. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan pada awal pandemi menambah beban bagi siswa dan tenaga pendidik, terutama di daerah-daerah dengan akses internet terbatas. Meskipun begitu, pemulihan sektor pendidikan di Sumut pasca-pandemi menunjukkan tanda-tanda positif, dengan kembali dibukanya sekolah secara tatap muka dan penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhan, periode 2018-2023 di Sumut mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meskipun tantangan besar masih harus dihadapi, terutama dalam hal kualitas pengajaran, pemerataan fasilitas, dan kesenjangan sosial-ekonomi di daerah terpencil.

Adapun perkembangan rata-rata lama sekolah di provinsi Sumatera Utara di Tahun 2018 sampai dengan 2023 yaitu sebagai berikut.

Gambar 1.4
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara 2018-2023



Sumber BPS Sumatera Utara (Data Diolah)

Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa Sumatera Utara mengalami perbaikan selama kurun waktu 2018-2023. Rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara mengalami peningkatan, dimulai pada tahun 2018 dengan angka 9,34 dan terus meningkat hingga mencapai 9,82 pada tahun 2023.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah di provinsi tersebut tercatat sebesar 9,82. Apabila dianalisis berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2023, Kota Medan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi, yaitu 11,62, sedangkan Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki rata-rata terendah, yaitu 5,88 dan 6,23.

Perbedaan rata-rata lama sekolah antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya ketimpangan jenjang pendidikan antardaerah. Ketimpangan tersebut dapat menghambat optimalisasi produktivitas masyarakat di beberapa daerah karena rendahnya kualitas tenaga kerja yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut, ketidakmerataan infrastruktur jalan dan tingkat pendidikan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menjadi kendala dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.

Selain itu, meskipun terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir, namun hal tersebut belum diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Sumatera Utara. Fenomena tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara” untuk menganalisis sejauh mana infrastruktur jalan, TPAK, dan tingkat pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Teori Sumber Daya Manusia (Human Capital Theory) Teori ini berpendapat bahwa pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam ekonomi. Pendidikan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Tenaga kerja yang terdidik lebih mampu beradaptasi dengan teknologi baru, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan produktivitas kerja, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori ini, pendidikan dipandang sebagai investasi yang memperkaya modal manusia, yang sebanding dengan investasi pada modal fisik. Semakin tinggi tingkat pendidikan dalam suatu negara, semakin besar potensi untuk meningkatkan output ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen juga berpendapat bahwa faktor-faktor internal, seperti tingkat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai pemicu inovasi dan peningkatan produktivitas, yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mempercepat adopsi teknologi, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Dalam model ini, negara yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki inovasi dan teknologi yang lebih maju, yang mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pendidikan yang lebih baik mendorong kemajuan teknologi dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan,yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara belum cukup baik, hal ini terlihat pada tahun 2020 jumlah PDRB mengalami

penurunan yang cukup pesat dan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang cukup lambat. Selain itu terdapat ketimpangan jumlah PDRB Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

2. Ketersediaan infrastruktur jalan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera masih didominasi di perkotaan, sehingga adanya ketimpangan jalan, ini dapat mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi
3. Tingkat pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten dan Kota yang berada pada Provinsi Sumatera Utara mengalami ketimpangan
4. Terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja namun Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sehingga tidak sesuai dengan teori.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada:

1. Pengaruh Infrastruktur jalan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
2. Data penelitian menggunakan data Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018-2023

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang dikemukakan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah infrastruktur jalan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara?
- 2) Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara?
- 3) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara?
- 4) Apakah infrastruktur jalan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca yang memiliki kepentingan khususnya pada lingkungan perguruan tinggi. Serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian berikutnya khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh infrastruktur jalan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat untuk penulis

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu ataupun teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh.

2. Manfaat untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam pengelolaan pembangunan wilayah serta upaya dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.